

STRATEGI PEMERINTAH NAGARI MANDEH DALAM MEWUJUDKAN MANGROVE SEBAGAI DESTINASI WISATA

Ibnu Abbas¹, Dsena Aromatica², M. Ichsan Kabullah³

Program studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,
Universitas Andalas, Padang, Indonesia

ibnuabbas@gmail.com¹, muhammadichsankabulla@soc.unand.ac.id³

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis Strategi Pemerintah Nagari Mandeh dalam mewujudkan mangrove sebagai destinasi wisata. Penelitian ini menggunakan teori Strategi yang dikemukakan oleh Kotten yang mencakup 4 variabel yaitu strategi organisasi, Strategi program, Strategi dukungan sumber daya dan juga Strategi kelembagaan. Penelitian ini berlokasi di Nagari Mandeh Tarusan dengan unit analisis Pemerintah nagari mandeh. Metode yang diterapkan yaitu metode kualitatif dengan tipe deskriptif, Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara dan dokumentasi dan obsevasi. Dalam pemilihan informan, menggunakan teknik purposive sampling. Teknik keabsahan data dilaksanakan dengan metode triangulasi sumber. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa strategi yang digunakan oleh pemerintah nagari sudah maksimal. Dimana dalam *strategy corporate* nya rencana pembangunan wisata mangrove tersebut telah sesuai dengan visi dan misi pemerintah nagari mandeh. Dalam *strategy Program*, program yang dilakukan oleh pemerintah nagari untuk mewujudkan wisata mangrove tersebut telah dilakukan dengan sebaik mungkin, namun masih adanya kendala terkait perizinan lingkungan yang bertentangan dengan perda yang pada saat sekarang ini telah direvisi, di tahun 2023 akan keluar perda baru yang memperbolehkan pembangunan wisata mangrove tersebut. Dalam *Resource Support Strategy* pemerintah nagari mengalami kendala anggaran pembangunan wisata mangrove, dimana anggran tersebut dialihkan dalam menanggulangi Covid 19, maka dari itu DKP provinsi memberikan fasilitas pembangunan secara fisik terkait pembangunan wisata mangrove. Begitu juga dengan *Institutional Strategy* dimana struktur yang mengelola wisata mangrove tersebut pemerintah nagari menunjuk BUMNag yang mengelolanya, akan tetapi SOP dalam pelaksanaannya belum ada sampai saat ini.

Kata Kunci: **Strategi, Pemerintah Nagari Mandeh, Wisata Mangrove**

ABSTRACT

This study is being conducted in Nagari Mandeh Tarusan with the Nagari Mandeh Government's analysis unit. The method used is a qualitative descriptive method with data collection techniques such as interviews, documentation, and observation. Purposive sampling was used to select informants. The source triangulation method was used to perform the data validity technique. This study employs Kotten's strategy theory, which includes four variables: Corporate Strategy, Program Strategy, Resource Support Strategy, and Institutional Strategy. The results of this study suggest that the Nagari government's strategy is maximal. Where in the company's strategy is the mangrove tourism development plan in accordance with the Mandeh Nagari government's vision and mission, In the program strategy, the nagari's program to realize mangrove tourism has been carried out as well as possible, but there are still obstacles related to environmental permits that are contrary to the regional regulations that are currently being revised; in 2023, a new regional regulation that is permitted for tourism development will

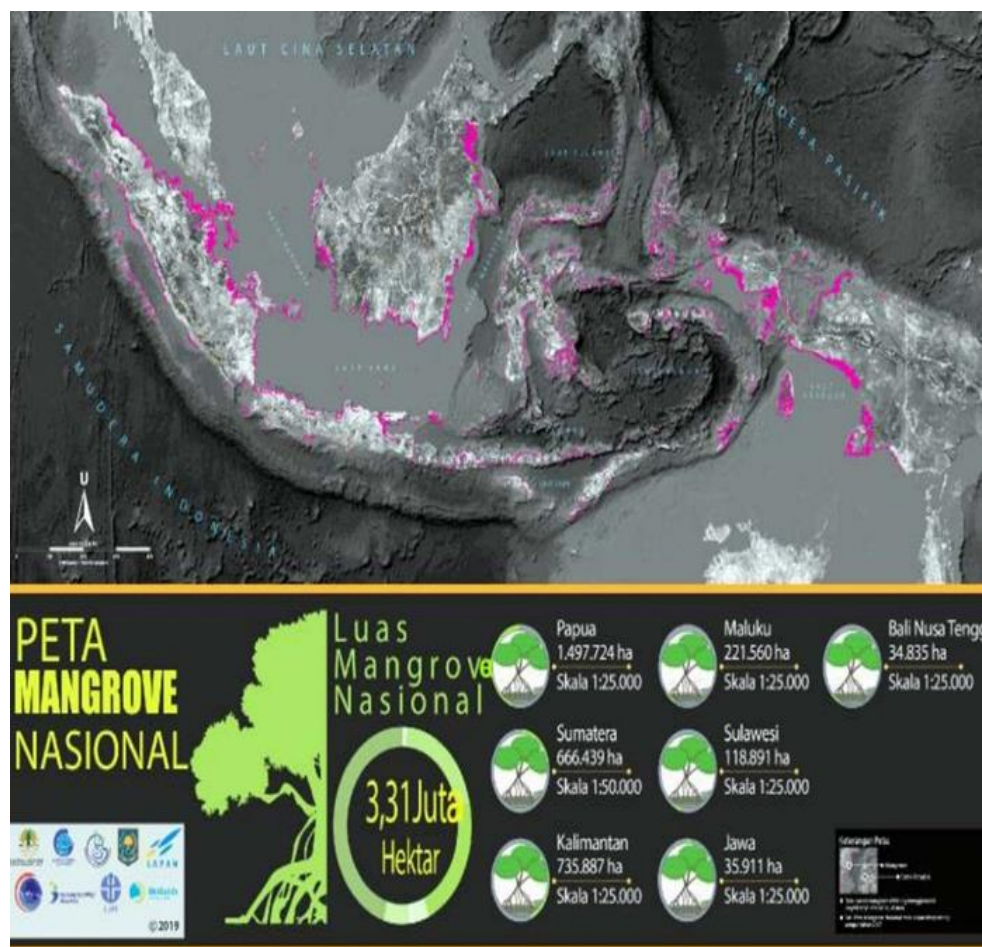
be issued. The nagari government experienced budget constraints for the development of mangrove tourism in the Resource Support Strategy, where the budget was diverted in addressing Covid 19, so the provincial DKP provided physical development facilities related to the development of mangrove tourism. Similarly, the Nagari government appoints Bumrag to manage mangrove tourism, but the SOP for its implementation does not yet exist.

Keywords: *Strategy, Mandeh Village Government, Mangrove Tourism*

PENDAHULUAN

Dengan keberadaan mangrove memberikan banyak manfaat bagi seluruh keadaan yang berada di pesisir pantai. Sedangkan di Indonesia sendiri hutan mangrove menjadi salah satu yang terbesar di dunia, dengan panjangnya garis pantai yang ada di Indonesia. Luas hutan mangrove di Indonesia yakni 8,6 juta Ha yang terbagi yaitu 3,8 juta Ha terdapat di kawasan hutan dan begitu juga 4,8 juta Ha terdapat diluar kawasan hutan. Dengan begitu luasnya hutan mangrove yang dimiliki Indonesia dan juga begitu banyak potensi hutan yang ada, sehingga dampak yang sangat baik untuk kebutuhan di Indonesia sendiri.

Gambar 1. Peta Mangrove Indonesia



Sumber: Rahmanto (2020)

Ini merupakan persebaran mangrove yang ada di Indonesia, dengan banyaknya persebaran mangrove di tepi pesisir pantai yang berada di Indonesia salah satunya di Papua yakni 1.497.724 ha menjadikan Papua yang memiliki mangrove yang terbesar berada di Indonesia, dan yang paling sedikit yaitu berada di Bali Nusa Tenggara yaitu sebesar 34.835 ha. Dengan keberadaan hutan mangrove tersebut ini menjadikan perairan Indonesia sangat kecil terkena dampak yang akan terjadinya pengikisan yang terdapat di pantai Indonesia tersebut

Mangrove memiliki fungsi ekonomi dan ekologis, fungsi ekonomi mangrove yakni bisa menghasilkan keperluan industri dan juga bahan kebutuhan rumah tangga, kalau fungsi ekologis nya yakni sebagai pelindung garis atau tepi pantai. Kondisi ekosistem mangrove dengan status kritis saat ini yaitu mencapai 637.624,31 Ha atau setara dengan 19,26% dari total ekosistem mangrove di Indonesia. Beberapa ancaman ekosistem mangrove di Indonesia disebabkan oleh Alih fungsi lahan menjadi tambak, pelabuhan, industri, pemukiman dan perkebunan. Pada saat sekarang salah satu cara dalam melestarikan hutan mangrove adalah dengan membuat hutan mangrove sebagai salah satu tujuan ekowisata. Maka dari itu hutan mangrove digunakan sebagai salah satu sarana agar kegiatan pendidikan yang berhubungan dengan ekologi (UU no 32 Th 2009).

Pengembangan ekowisata mangrove pada saat sekarang sudah mulai gencar dilakukan di beberapa daerah. Salah satu daerah yang telah berhasil melakukan pengelolaan hutan mangrove melalui bentuk ekowisata adalah Desa Wisata Apar, yang pada tahun 2021 ini mendapatkan penghargaan terbaik kategori Desa Digital pada Anugerah Desa Wisata Indonesia (ADWI) 2021. Salah satu faktor yang mendorong hal tersebut adalah adanya wisata tracking ke hutan mangrove di area tepi mangrove (Petiwi, Fuji).

Sumatera barat merupakan salah satu provinsi dengan potensi ekowisata mangrove di beberapa kawasan garis pantainya. Salah satu daerah yang ingin mengembangkan konsep ekowisata mangrove berada di wilayah kabupaten pesisir selatan, yaitu berada di Nagari Mandeh, Kecamatan Koto XI Tarusan yang menjadi kawasan wisata bahari di Kabupaten Pesisir Selatan, yang memiliki sebuah potensi yang sangat besar untuk dikembangkan menjadi suatu tempat wisata. Potensi wisata bahari menjadi dasar pemikiran bagi penulis untuk membuat fungsi kawasan wisata yang selaras dengan kebaharian.

Berikut adalah luas mangrove yang ada di Sumatra Barat, Mentawai 32.600 Ha, Pasaman 6.273,5 Ha, Pesisir selatan 325 Ha, Agam 313,5 Ha, Padang Pariaman 200 ha dan Padang 120 Ha. Dari keenam luas mangrove tersebut Mentawai memiliki mangrove yang sangat luas di Sumatra Barat yakni sekitar 32.600 Ha, sedangkan yang paling

sedikit mangrove nya berada di Kota Padang yakni sebanyak 120 Ha. Pesisir selatan terdapat di urutan nomor tiga yakni dengan luas persebaran mangrovenya 325 Ha.

Di pesisir selatan terdapat begitu banyak mangrove yang berada di pesisir lautan nya, salah satunya berada di kawasan nagari mandeh, Kecamatan Koto XI Tarusan kabupaten Pesisir selatan yang saat ini mandeh dijadikan salah satu tempat destinasi wisata yang sangat banyak dikunjungi oleh wisatawan lokal maupun manca negara. Mangrove di pesisir selatan menjadikan salah satu destinasi wisata bahari yang mengembangkan tren wisata alam agar mangrove yang ada di sana juga dapat terlestarikan sebagai mana yang diinginkan oleh pemerintah nagari tersebut. Dan di kawasan mandeh sendiri pemerintah nagari ingin menjadikan tempat wisata yang akan mendapatkan retribusi pendapatan nagari, disitu juga masyarakat juga dapat mengelolanya supaya perekonomian di nagari mandeh tersebut menjadi stabil.

Pengelolaan ekowisata mangrove diatur dalam Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau- Pulau Kecil Provinsi Sumatera Barat Tahun 2018-2038 (Perda nomor 2 tahun 2018), mengatakan strategi pengelolaan hutan mangrove meliputi peningkatan luas rehabilitasi hutan mangrove yang telah rusak, pengembangan ekowisata mangrove yang berbasis masyarakat, pengelolaan kawasan hutan mangrove secara terintegrasi dan lintas sektoral, pemberdayaan masyarakat di sekitar hutan mangrove dan juga. Kesadaran masyarakat untuk terlibat aktif dalam upaya perlindungan dan pelestarian hutan mangrove. Berdasarkan kepada UU Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pengembangan Kepariwisata Nasional (RIPPARNAS), dimana kawasan ini masuk kedalam Kawasan Pariwisata Nasional (KPN) Kabupaten Pesisir Selatan. Dimana kawasan ini masuk dalam Kawasan pariwisata Nasional Pesisir Selatan. Kawasan Mandeh ditargetkan menjadi daerah tujuan wisata utama di Sumatera Barat disamping sektor perikanan yang telah menjadi basis keunggulan daerah Kabupaten Pesisir Selatan.

Dalam Perbup Pesisir selatan Nomor 46 tahun 2017 pasal 8 ayat 2 mengatakan Pembangunan kawasan perdesaan berskala kawasan, didanai dari APBNagari dan pelaksanaannya diserahkan kepada nagari atau kerja sama antar nagari(Perbup Nomor 46 tahun 2017 pasal 8 ayat 2), Dalam peraturan bupati tersebut dapat dikatakan bahwasanya apabila pembangunan yang dilakkan oleh suatu nagari itu akan diberikan sepenuhnya pelaksanaannya kepada nagari tersebut, dengan didanai oleh APBNagari tersebut dan juga nagari dapat bekerja sama antar nagari disekitarnya tersebut.

Pemerintah Nagari Mandeh serius dalam mengembangkan potensi ekowisata mangrove yang dimiliki. Salah satu potensi yang dimiliki Nagari Mandeh adalah luasnya keberadaan hutan mangrove, sehingga pemerintah berinisiatif dalam mewujudkan potensi tersebut. Pemerintah Nagari Mandeh dalam mewujudkan

tujuannya telah membuat *master plan* yang mana terdapat berbagai perencanaan dalam pengembangan ekowisata mangrove.

Gambar 1 Master Plan Pemerintah Nagari Mandeh



Sumber: pemerintah Nagari Mandeh

Diketahui bahwa perencanaan dalam mewujudkan ekowisata mangrove terdapat beberapa perencanaan pembangunan yang dapat meningkatkan potensi ekowisata tersebut. Perencanaan terdiri dari pembangunan ruang pengelolaan *cottage*, dermaga, gudang, toilet, stand Cano, parkir Cano, *gallery mangrove* dan restoran, *cottage*, *cage seafood*, *laundry*, *linen*, menara pandang, gazebo, workshop mangrove, suvenir, ruang pengelolaan mangrove park, tugu mangrove dan mangrove park. Perencanaan tersebut merupakan rancangan dalam mewujudkan mangrove yang dimiliki sebagai salah satu lokasi ekowisata di Sumatera Barat. Dengan adanya perencanaan yang dibuat oleh pemerintah nagari tersebut yang akan membuat mangrove sebagai destinasi wisata, Begitu juga dengan adanya master plan dan juga kerjasama dengan berbagai kalangan pihak, maka dari itu peneliti tertarik melihat bagaimana Strategi pemerintah Nagari Mandeh dalam mewujudkan mangrove sebagai destinasi wisata.

METODE PENELITIAN

Pada penelitian ini, peneliti menggunakan jenis penelitian kualitatif. Penelitian

kualitatif adalah penelitian yang menggunakan latar ilmiah dengan tujuan menafsirkan fenomena yang terjadi dan dilakukan dengan jalan melibatkan berbagai metode yang ada. Maksud dari ilmiah di sini adalah perolehan data penelitian dilakukan dengan cara berada di tempat dimana penelitian itu dibuat. Dengan pendekatan kualitatif ini diharapkan bisa menggambarkan permasalahan yang terjadi dalam Strategi Pemerintah Nagari Mandeh dalam Maujudkan Mangrove Sebagai Destinsi Wisata sebagai fokus penelitian secara lebih luas dan dalam.

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan wawancara terstruktur dimana peneliti memiliki fokus tertentu lalu hasil wawancara kemudian disusun secara sistematis untuk mempermudah penyelidikan hasil temuan data di lapangan. Untuk observasi peneliti langsung mendatangi kantor Wali Nagari Mandeh dan yang terlibat langsung dalam pembangunan wisata mangrove tersebut. Kemudian, peneliti juga melakukan observasi langsung kepada Pihak pihak yang terlibat seperti DKP Sumbar, KPHL Bukit Barisan dan Dinas Pariwisata Pesisir selatan.

Teknik pemilihan informan dalam penelitian ini menggunakan teknik purposive sampling yang mana disini peneliti terlebih dahulu menetapkan kriteria informan guna menyaring informan kunci. Sedangkan yang menjadi unit analisis dalam penelitian ini adalah Lembaga, yaitu Pemerintah Nagari Mandeh. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis oleh Kottin terdiri atas 4 (empat) tahapan, yaitu Strategi Organisasi, Strategi Program, Strategi sumberdaya dan Strategi Kelembagaan, teknik keabsahan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik triangulasi, yaitu triangulasi sumber.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Sesuai dengan topik penelitian ini, penelitian menggunakan teori strategi menurut Jack Kottin dalam bukunya “Strategic Management in Public and Nonprofit Organizations” serta juga dijabarkan dalam bukunya “Pengambilan Keputusan Strategik untuk Organisasi Publik dan Organisasi Nonprofit” milik J. Salusu:

Strategi Organisasi (*Corporate Strategy*)

Strategi organisasi ini berkaitan dengan perumusan visi, misi, nilai-nilai dan inisiatif strategi yang baru. Pembahasan yang perlu dilakukan yaitu apa yang ingin dilakukan dan untuk siapa. Pada penelitian ini, Dalam tipe Strategi Organisasi dapat tergambarkan secara jelas dan ringkas tentang organisasi tersebut dan harus seperti apa organisasi kedalam pernyataan Visi dan Misi Organisasi. yang dimaksud dengan strategi organisasi (*corporate strategy*) ialah strategi yang digunakan oleh pemerintah Nagari Mandeh dalam mewujudkan mangrove sebagai destinasi wisata yang akan dijelaskan melalui indikator berupa perumusan Visi, Misi yakni sebagai berikut:

Perumusan Visi

Dalam sebuah organisasi ataupun instansi visi merupakan sesuatu yang sangat penting karena akan terlihat apa yang ingin dicapai dalam jangka waktu tertentu baik dalam jangka waktu panjang. Adapun visi misi dari Nagari Mandeh yakni Terwujudnya Masyarakat Desa Mandeh yang Bersih, Religius, Rapi dan Indah melalui Akselerasi Pembangunan yang Berbasis Keagamaan, Budaya Hukum dan Berwawasan Lingkungan dengan Berorientasi pada Peningkatan Kinerja Aparatur dan Pemberdayaan Masyarakat (Profil Nagari Mandeh). Salah satu potensi yang dimiliki nagari mandeh yakni keberadaan hutan mangrove yang beberapa tahun terakhir banyak dikembangkan nagari lain sebagai destinasi wisata. Berdasarkan visi itu juga, pengembangan wisata mangrove dimandeh merupakan bagian dari wisata bahari yang berbasis berwawasan lingkungan. Melalui pengembangan wisata mangrove ini juga, menjadi bagian visi dari nagari mandeh terkhususnya pemberdayaan masyarakat yang akan berpartisipasi dalam penyelenggaraan wisata mangrove disana. Dengan adanya wisata mangrove yang membuat mangrove sehingga lingkungan mangrove tersebut dapat juga terlestarikan secara langsung. Begitu juga dengan wisata mangrove ini masyarakat setempat dapat juga diberdayakan dengan banyak kegiatan yang dilaksanakan oleh masyarakat dengan pembangunan wisata mangrove tersebut.

Perumusan Misi

Berdasarkan visi di atas maka hal ini tidak bisa terlepas dari yang namanya misi, misi merupakan bagian dari visi namun hal ini berbeda, visi yaitu sesuatu yang ingin dicapai dalam waktu yang akan datang atau bisa dikatakan dalam jangka waktu tertentu dan setelah itu Visi tersebut kemudian dijabarkan ke dalam misi. Misi ini merupakan sesuatu yang ingin dicapai dalam waktu dekat, misi lebih terkonsentrasi kepada target-target yang sifatnya lebih operasional. Salah satu misi dari nagari mandeh dengan adanya pembangunan jangka pendek yaitu, meningkatkan sarana dan prasarana ekonomi warga desa dengan perbaikan prasarana dan sarana ekonomi (Profil Nagari Mandeh).

Dengan adanya pembangunan wisata mangrove ini sangat banyak sekali dampak yang dirasakan masyarakat nagari mandeh. Yaitu dengan terbukanya lapangan pekerjaan bagi masyarakat setempat dan pemuda-pemuda yang ada disana juga bisa mendapatkan pekerjaan dari pembangunan wisata mangrove tersebut. Ini juga menjadikan wisata mangrove tersebut sebagai lahan dalam menambah mata pencarian dari masyarakat setempat, hal tersebut dapat menumbuhkan perekonomian yang sangat baik bagi masyarakat di nagari mandeh tersebut. Perencanaan pembangunan wisata mangrove ini telah sesuai dengan visi dan misi yang dimiliki oleh pemerintah nagari mandeh. Dari strategi organisasinya yaitu Visi dan misi yang dipaparkan oleh pemerintah nagari bahwasanya dari pembangunan wisata mangrove tersebut dapat

menunjang keberhasilan visi dan misi yang dibuat, karena dapat meningkatkan suatu perekonomian bagi masyarakat dengan adanya pembangunan wisata mangrove tersebut yang berada di nagari mandeh.

Strategi Program

Strategi ini agak lebih memberikan perhatian kepada implikasi- implikasi strategi dari suatu program tertentu, dan juga apa dampaknya bila dalam suatu program tertentu dilancarkan atau juga dampaknya bagi sesama organisasi untuk kedepannya. Begitu juga program yang dibuat sangat memiliki dampak yang sangat maksimal.

Program

Program yakni seperangkat aktivitas dan kegiatan organisasi untuk mencapai suatu perubahan dalam organisasi terhadap suatu kelompok sasaran tertentu. Program-program yang dilaksanakan menjadi langkah- langkah strategi yang sangat efektif terhadap tujuan yang hendak dicapai oleh organisasi tersebut. Strategi program dalam penelitian ini dapat dilihat dari berbagai program kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah Nagari mandeh dalam mewujudkan mangrove sebagai destinasi wisata.

Strategi program yang dilakukan oleh pemerintah Nagari Mandeh yakni dengan sangat banyaknya potensi yang dimiliki oleh Nagari tersebut yaitu wisata pulau yang sangat membantu sekali pendapatan yang ada di nagari tersebut, wisata mangrove tersebut juga akan memiliki peluang yang sama dengan wisata lain tersebut. Destinasi wisata mangrove tersebut menjadikan sebuah peluang bagi nagari dan juga masyarakat setempat. Perencanaan wisata mangrove tersebut merupakan ide atau keinginan dari pemerintah nagari dan juga masyarakat nagari mandeh sendiri. Begitu juga dengan perencanaan yang dibuat oleh Nagari mandeh sendiri juga disetujui oleh DKP, dengan pendanaan langsung yang diberikan oleh DKP provinsi, ini menjadikan suatu dampak yang bagus terhadap nagari mandeh seandainya cepat terlealisasi. Berikut foto DKP turun langsung meninjau Mangrove yang ada di Nagari Mandeh tersebut.

Bahwasanya tim dari Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumbar turun langsung kelapangan yakni di nagari mandeh itu sendiri, disana ia membahas bagaimana kelanjutan rencana wisata mangrove yang akan dilakukan pembangunan tersebut. Dan juga disini misi yang diinginkan pemerintah nagari mandeh yaitu dengan akan terealisainya pembangunan wisata mangrove tersebut. Setelah pertemuan nagari dan DKP, maka untuk beberapa alasan pemerintah nagari memberikan wewenang pembangunan fisik wisata mangrove kepada DKP, alasannya minimnya anggaran yang dimiliki oleh pemerintah nagari. Serta didalam undang- undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, pada lampiran poin Y tentang pembagian urusan kelautan dan perikanan disebutkan bahwa 0- 12 mil di luar minyak dan gas bumi serta penerbitan izin dan pememfaatan ruang laut adalah wewenang provinsi.

Dinas pariwisata pesisir selatan melakukan program pelatihan kepada seluruh pokdarwisa yang ada di wilayah pesisir selatan tersebut, Pokdarwis sendiri diberikan sebuah pelatihan oleh dinas pariwisata pesisir selatan, dari gambar diatas kita melihat pelatihan yang dilakukan oleh dinas tersebut memberikan pelatihan terhadap pokdarwis adapun pelatihan yang diberikan yakni berdasarkan kebutuhan yang diminta oleh berbagai nagari tersebut. pelatihan yang diberikan oleh dinas pariwisata pesisir selatan sangat berdampak kepada nagari yang diberikan sebuah pelatihan. pemerintahan nagari tidak terlepas dengan dinas pariwisata pesisir selatan, yakni dengan diberi tahu kepada dinas tersebut bahwasanya pembangunan mangrove tersebut akan dilakukan, begitupun sebaliknya dinas pariwisata sendiri juga memainkan perannya yakni dengan memberikan sebuah pelatihan yang dirasa perlu terhadap pokdarwis di nagari mandeh tersebut, dinas pariwisata dapat mengontrol kerja dari pokdarwis tersebut supaya menjadikan wisata mangrove tersebut dapat berjalan dengan baik.

Dampak Program

Dampak program yakni sesuatu yang muncul atau terjadi dari suatu kegiatan yang diterapkan atau dilakukan oleh suatu instansi dan lembaga dimana hal yang bisa berakibat positif maupun negatif dimana juga akan memberi perhatian terhadap kelompok dan sasaran organisasi. Dengan mengetahui dampak program dapat dijadikan dalam membuat strategi selanjutnya bagi pemerintah nagari mandeh dan juga mempertimbangkan dampak dari sebuah program yang telah mereka lakukan. Hal tersebut sebagaimana yang dilakukan oleh pemerintah nagari dengan ide ide yang rencanakan oleh nagari yaitu dengan adanya pembuatan *master Plan* oleh pemerintah nagari mandeh

Gambar 1 Tracking dari DKP Provinsi Sumatera Barat



Sumber: DKP Provinsi Sumatera Barat

Tracking hutan mangrove yang akan dibangun, gamabar tersebut pengembangan dari *Master plan* yang dimiliki oleh pemrtintah nagari dimana begitulah tampak gamaran pembangunan fisik wisata mangrove yang berada di nagari mandeh tersebut, untuk itu tracking yang dimiliki oleh dinas kelautan dan perikanan provinsi sumatera barat yang akan dipakai nantinya dikarenakan mangrove yang berada di nagari mandeh tersebut diserahkan oleh pemerintah nagari sebagai mana dilihat dari gambar 3.3 penyerahan hutan mangrove kepada DKP provinsi. Dengan beberapa rancangan yang sudah siap dilakukan oleh DKP tersebut, ada pula kendala yang saat ini masih ditunda karena perizinan lingkungan

Bahwasanya pembangunan tersebut masih ditunda karena perda yang masih berlaku sekarang, didalam Perda provinsi sumatera barat nomor 2 tahun 2018 pasal 41 (b) mengatakan kegiatan yang tidak boleh dilakukan di zona KPU-ZHM yaitu menebang hutan mangrove(perda nomor 2 tahun 2018).

Begitu juga persiapan yang dilakukan oleh pemerintah nagari dengan menambah pengetahuan tentang mangrove tersebut, hal ini dilakukan oleh Pokdarwis nagari mandeh. Dimana pokdarwis tersebut juga mendapatkan pelatihan yang dilakukan oleh dinas pariwisata pesisir selatan, yakni apabila pembangunan tersebut terlaksana maka dari itu pelatihan yang didapatkan oleh Pokdarwis tersebut supaya dapat menjadikan pedoman dalam mendampingi pemerintah nagari dalam menjalankan pengelolaan wisata mangrove tersebut. Program yang dilakukan oleh pemerintah nagari sudah dilakukan dengan sebaik mungkin, namun masih adanya kendala terakit perizinan lingkungan yang bertentangan dengan perda yang ada saat sekarang ini telah direvisi, namun pada tahun 2023 akan dikeluarkan perda yang baru agar pembangunan wisata mangrove tersebut dapat terlaksana. Dari strategi program diatas bahwasanya pemerintah nagari baru melakukan tahapan dengan pembuatan master plan yang akan dibangunnya wisata mangrove tersebut, dan begitu juga pada saat sekarang ini pemerintah nagari juga melakukan permohonan izin yang sampai sekarang ini masih ditunda dengan menunggu hasil dari perizinan tersebut.

Strategi Dukungan Sumber Daya

Strategi sumber daya ini lebih memusatkan perhatian kepada memaksimalkan mamfaat sumber sumber daya esensial yang ada guna meningkatkan kualitas kerja suatu organisasi. Dengan memaksimalkan ketersediaan suatu sumber daya tersebut akan dapat meningkatkan kinerja organisasi. Dukungan sumber daya ini merupakan semua fasilitas utama atau dasar yang memungkinkan suatu strategi organisasi itu bisa berjalan dengan semaksimal mungkin. Dalam melaksanakan sebuah strategi yang baik dukungan sumber daya sangat di perlukan karena dukungan sumber daya ini sangat menentukan kedepnya apakah suatu strategi itu bisa berjalan dengan baik atau malah sebaliknya. Dan juga dalam hal ini strategi dukungan sumber daya tersebut bisa kita lihat dari

beberapa pembagiannya.

Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia yakni potensi manusia yang merupakan aset dan berfungsi sebagai modal non materil non finansial didalam organisasi yang dapat diwujudkan menjadi potensi nyata secara fisik dan non fisik dalam mewujudkan strategi organisasi. Sumber Daya Manusia merupakan salah satu factor yang sangat penting bahkan tidak bisa di lepaskan dari sebuah organisasi, baik institusi maupun perusahaan. Berikut daftar sumber daya manusia beserta tingkat pendidikan yang di miliki oleh Pemerintah Nagari Mandeh. Bahwasanya peangkat yang berada dinagari tersebut rata rata memiliki pendidikan yakni tamatan SMA ini menunjukan pendidikan yang berada di Nagari Mandeh tersebut begitu minimnya sumberdaya manusia yang dimiliki oleh perangkat perangkat nagari tersebut. Disini dengan minimnya tingkat pendidikan yang dimiliki oleh pemerintah nagari, agar Nagari berupaya dengan memberikan pengetahuan tentang wisata mangrove tersebut.

Keuangan

Keuangan yaitu suatu pernyataan formal secara kuantitatif dari sumber daya yang telah disediakan untuk melaksanakan kegiatan- kegiatan yang direncanakan selama periode yang ditetapkan. Anggaran biasanya dalam bentuk angka yang menunjukan sejumlah uang. Tanpa adanya anggaran yang mencukupi maka suatu instansi atau organisasi tersebut akan sulit untuk berkembang. Karena faktor keuangan sangat menentukan kelanjutan suatu organisasi tersebut, walaupun di suatu organisasi itu memiliki sumber daya manusia yang hebat, tanpa adanya anggaran maka suatu organisasi akan mengalami kesulitan.

Anggaran yang akan digunakan untuk pembangunan tracking wisata mangrove yaitu didanai oleh DKP provinsi, dengan pembangunan fisik semua nya tersebut yakni Rp.825.000.000, dengan anggaran tersebut tracking wisata mangrove dapat dibangun. Apabila pembangunan tersebut sudah selesai DKP provinsi akan memberikan pengelolaan sepenuhnya kepada pemerintah nagari mandeh.

Sarana dan Prasarana

Sarana dan Prasarana yaitu segala jenis peralatan, perlengkapan kerja dan fasilitas yang berfungsi sebagai alat utama dalam pelaksanaan pekerjaan, dan begitu juga dalam rangka kepentingan yang sedang berhubungan dengan organisasi kerja. Sedangkan prasarana merupakan alat- alat yang menunjang dari sarana itu sendiri. Dengan itu sarana yang lebih ditujukan yaitu dengan alat alat dan benda yang bergerak, kalau Prasarana yaitu lebih ditujukan yakni untuk alat dan benda- benda yang tidak bergerak. Sarana yang tersedia merupakan komponen yang penting dalam melaksanakan kegiatan dalam meningkatkan kunjungan wisatawan.

Bahwasanya penunjang dari wisata mangrove itu sendiri yakni sarana dan prasarana supaya akses untuk menuju ke wisata tersebut menjadi lebih mudah begitu

juga dengan wisata dan wisatawan menjadi hal yang menarik untuk dikunjungi sebagai suatu tempat wisata alam yang sangat indah, jadi wisata menjadi menarik dikarenakan suatu akses yang sangat bagus. Dengan anggaran yang di alihkan oleh pemerintah nagari kepada Covid 19, untuk itu DKP provinsi memberikan fasilitas untuk pembangunan fisik dari tracking mangrove tersebut. Dari strategi sumberdaya yaitu dikatakan bahawasanya dengan kurangnya SDM yang mengetahui akan tentang wisata mangrove tersebut, disamping itu juga anggaran yang difasilitasi pembangunan fisik wisata mangrove tersebut oleh DKP provinsi dengan prasarana yang layak untuk mencapai suatu akses ketempat wisata mangrove yang akan dijadikan tempat wisata tersebut.

Strategi Kelembagaan

Strategi Kelembagaan adalah dalam mengembangkan kemampuan organisasi untuk melaksanakan inisiatif – inisiatif strategi lembaga tersebut yang mengatur bagaimana jalannya suatu organisasi yang dilakukannya

Struktur

Di dalam strategi kelembagaan tersebut struktur serta suatu kewenangan lembaga dan instansi yang memiliki suatu tugas melaksanakan strategi promosi menarik kunjungan wisatawan. Kewenangan lembaga merupakan unsur penting dalam menjalankan suatu strategi dimana hal tersebut menjadi daya tarik kunjungan wisatawan. Struktur organisasi yaitu suatu sistem atau jaringan kerja terhadap pembagian kerja, sistem pelaporan dan komunikasi yang menghubungkan secara bersama. Di sini organisasi yang terstruktur dan siapa melapor kepada siapa dikarenakan struktur organisasi yang mengatur sebuah sistem kerja, komunikasi, wewenang dan tanggungjawab, begitu juga dengan pelimpahan tugas kepada unit kerja atau orang-orang tertentu untuk mencapai sasaran yang diinginkan oleh suatu organisasi. Pada hakikatnya struktur tersebut adalah sebuah kordinator yang mengkondisikan suatu kegiatan dan kemudian apakah anggotanya bisa menyesuaikan diri dari dalam sebuah kegiatan yang dilakukan oleh organisasi tersebut.

Peraturan Standar Operasional

Salah satu aspek struktur yang penting dari setiap lembaga adalah adanya prosedur operasi yang standar. SOP menjadi pedoman bagi institusi dalam bertugas melaksanakan strategi meningkatkan wisatawan. Standar Operasional Prosedur bisa juga kita mengartikanya sebagai prosedur yang harus di ikuti di dalam melakukan suatu kegiatan atau program. dalam menjalankan SOP semua pegawai atau aparatur harus terlibat karena, semua pelaksana SOP adalah semua yang berada dalam jajaran atau organisasi yang mengaplikasikan SOP mulai dari pegawai terendah sampai pegawai tertinggi. Pada saat sekarang ini SOP dalam pembanguana wisata mangrove tersebut belum ada dikearenakan belum adanya mulai pembangunan wisata mangrove.

PENUTUP

Berdasarkan Temuan yang telah peneliti lalui dalam hal ini maka peneliti memberikan kesimpulan bahwa strategi pemerintah nagari mandeh dalam mewujudkan mangrove sebagai destinasi wisata pada sejauh ini masih terkendala dengan izin lingkungan. Hal itu sejalan dengan teori yang dipaparkan oleh Kotten yang terdiri dari strategi organisasi dalam strategi yang diterapkan oleh pemerintah nagari yang begitu maksimal dalam menjadikan wisata mangrove tersebut, hal tersebut dilihat dengan adanya yaitu dengan lahan yang akan dijadikan wisata mangrove tersebut memiliki sepenuhnya oleh pemerintah nagari yang mengelolanya. Begitu juga dengan visi dan misi yang dikatakan oleh nagari yakni menjadikan wisata mangrove tersebut sebagai lahan dalam menambah mata pencarian dari masyarakat setempat, hal tersebut dapat menumbuhkan perekonomian yang sangat baik bagi masyarakat di nagari mandeh tersebut. Perencanaan pembangunan wisata mangrove ini telah sesuai dengan visi dan misi yang dimiliki oleh pemerintah nagari mandeh.

Begitu juga pemerintah nagari yang mengurus perizinan kepada DKP Propinsi begitu juga pemerintah nagari sudah membuat/mempersiapkan *master Plan* yang telah dimiliki Nagari. Dalam perencanaan pembangunan tersebut, Walaupun saat sekarang ini nagari menunggu hasil dari perizinan lingkungan, apabila izin lingkungan tersebut selesai maka pembangunan akan dilaksanakan pada tahun ini, akan tetapi pada saat ini masih tertunda oleh perda provinsi sumatera barat nomor 2 tahun 2018 pasal 41 (b). Perda tersebut telah direvisi dan akan disahkan pada tahun 2023, maka dari itu pembangunan wisata mangrove tersebut akan dilaksanakan apabila perda tersebut telah disahkan. Begitu juga dengan yang dilakukan oleh pemerintah nagari dalam penelitian ini dapat dilihat dari yang dilakukan oleh dinas pariwisata pesisir selatan yakni dengan membentuk Pokdarwis yang ada di pemerintahan nagari tersebut, begitu juga pelatihan yang dilakukan oleh dinas pariwisata pesisir selatan terhadap pokdarwis yang ada di nagari mandeh karena Pokdarwis yang juga akan langsung turun terhadap pembangunan wisata mangrove yang ada di nagari mandeh tersebut.

Dalam strategi dukungan sumberdaya dimana dalam hal tersebut pemerintah nagari mempunyai kendala dalam tenaga yang terampil atau pendidikan yang tinggi dalam meningkatkan produktifitas kinerja yang ada di nagari, terbukti dengan kurangnya tamatan S1 di pemerintah nagari tersebut salah satu menjadi penghambat. Dan juga anggaran yang dimiliki pemerintah nagari mandeh itu dialih fungsikan dengan keadaan Covid 19, maka dari itu pemerintah nagari difasilitasi dengan pembangunan fisik wisata mangrove tersebut oleh DKP provinsi. Apabila pengerjaannya sudah selesai maka dari itu DKP akan memberikan sepenuhnya tanggungjawab terhadap pemerintah Nagari Mandeh dalam melakukan Pengelolaannya.

Selanjutnya yaitu dengan pola dari strategi kelembagaan bahwasanya yang

dikemukakan kotten yakni adanya struktur dan peraturan standar operasional, dalam hal ini yakni belum adanya struktur yang digunakan dalam pembangunan wisata mangrove tersebut akan tetapi pada saat sekarang ini pemerintah nagari memberikan sepenuhnya tanggung jawab kepada Bumrag yang mengelolanya apabila wisata mangrove tersebut telah rampung terlaksana, ataupun dengan SOP yang belum ada dikarenakan pembangunan wisata mangrove sendiri belum terlaksana.

DAFTAR PUSTAKA

- Nawawi, H. H. (2005). *Manajemen Strategik Untuk Organisasi Publik Dan Organisasi Nonprofit Bidang Pemerintahan Dengan Ilustrasi Bidang Pendidikan*. Yogyakarta.
- Salusu, J. (2004). *Pengambilan Keputusan Strategik*. Jakarta: Grasindo.
- Nazir, M. (2003). *Metode Penelitian*. Ghalia Indonesia Jakarta. *Bahasa Indonesia*
- Sugiyono. (2008). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*. Bandung: CV Alfabeta.
- Oka, A. Y. (1996). *Pengantar Ilmu Pariwisata*. Bandung: Angkasa, 197.
- Sunaryo, B. (2013). *Kebijakan Pembangunan Destinasi Pariwisata: Konsep Dan Aplikasinya Di Indonesia*. Gava Media..
- Suwantoro, G. (2004). *Dasar-Dasar Pariwisata*, Perpustakaan Pusat UNSIMAR.
- Basri, B. (2019). *Persepsi Masyarakat Terhadap Pengelolaan Kawasan Mangrove Di Desa Seruni Mumbul Kecamatan Pringgabaya Kabupaten Lombok Timur* (Doctoral Dissertation, Fakultas Perikanan).
- Simamora, N. (2018). *Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Hutan Mangrove Sicanang Kelurahan Sicanang Kecamatan Medan Belawan*.
- Hamdani, Ham (2020). *Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pelestarian Hutan Mangrove Di Desa Gebang Kecamatan Teluk Pandan Pesawaran*. Undergraduate Thesis, UIN Raden Intan Lampung.
- Khoirul, U. (2003). *Strategi Pengembangan Ekowisata Mangrove Wonorejo Surabaya* (Doctoral Dissertation, UPN" Veteran" Jatim).
- Mukhti, (2016). *Rancangan Pengelolaan Minawisata di Kawasan Wisata Bahari Terpadu Mandeh Sumatera Barat*. Program Magister Keahlian Teknik Manajemen Pantai Fakultas Teknologi Kelautan Institut Teknologi Sepuluh Nopember Surabaya.
- Sipahelut, dkk. (2019). *Manajemen Personalia*, Edisi keempat, Erlangga, Jakarta.
- Rahim, S., & Baderan, D. W. K. (2017). *Hutan Mangrove Dan Pemanfaatannya*. Deepublish.
- Utomo, B., Budiastuti, S., & Muryani, C. (2017). *Strategi Pengelolaan Hutan Mangrove Di Desa Tanggul Tlare Kecamatan Kedung Kabupaten Jepara*. *Jurnal Ilmu Lingkungan*, 15(2), 117-123.
- Eldo dan Prabowo(2020). *Strategi Pengelolaan Objek Wisata Mangrove Pandansari Sebagai Salah Satu Pendapatan Asli Daerah Kabupten Brebes*. Prodi Ilmu

Pemerintahan, Universitas Pancasakti Tegal

Pertiwi, Fuji. (2021). Desa Apar Pariaman Juara 3 Desa Digital ADWI 2021. Republika. (<https://www.republika.co.id/berita/r3sbhu457/desa-apar-pariaman-juara-3-desa-digital-adwi-2021>), diakses 16 Desember 2021

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH).

Peraturan Bupati pessel Nomor 46 tahun 2017 pasal 8 ayat 2.

Perda nomor 2 tahun 2018 Tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau- Pulau Kecil Provinsi Sumatera Barat Tahun 2018-2038

UU Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pengembangan Kepariwisata Nasional (RIPPARNAS)

Undang- undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah.